

**Judul** : Sindikat love scam dari penjara, Komisi XIII minta oknum sipir dipecat  
**Tanggal** : Minggu, 17 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Sindikat Love Scam Dari Penjara

## Komisi XIII Minta Oknum Sipir Dipecat

ANGGOTA Komisi XIII DPR Mafirion mendesak Pemerintah memecat tidak hormat lima petugas rutan yang diduga memfasilitasi kejahatan penipuan asmara atau love scamming. Keterlibatan oknum yang membantu 137 tahanan beraksi dari balik jeruji merupakan pengkhianatan wewenang, dan demi keadilan harus ditindak tegas tanpa kompromi.

Mafirion menyoroti mudahnya barang terlarang masuk ke rutan yang mengindikasikan adanya celah keamanan sengaja dibuka aparat. Diketahui, kasus terungkap setelah ditemukan 157 unit ponsel di tangan tahanan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 137 tahanan terindikasi kuat terlibat aktif dalam jaringan sindikat penipuan daring itu.

Mafirion menegaskan, aksi di Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara, Lampung, terjadi akibat lemahnya pengawasan internal petugas di lapangan. Akibatnya, ratusan korban merugi hingga mencapai Rp 1,4 miliar. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena fungsi pengamanan sama sekali tidak berjalan maksimal.

Petugas yang seharusnya menjaga keamanan justru diduga kuat jadi bagian dari sindikat pelaku kejahatan tersebut. Kejadian ini

sangat serius karena merusak kepercayaan publik secara luas. "Tidak ada ruang kompromi bagi oknum yang terlibat sehingga mereka harus dipecat dan diproses hukum," tegasnya, Selasa (12/5/2026).

Rutan, lanjut Mafirion, harusnya jadi tempat pembinaan bagi narapidana, bukan justru beralih fungsi jadi pusat pengendalian kejahatan baru. Untuk itu, negara tidak boleh kalah oleh praktik kotor yang merugikan masyarakat. Lolosnya ratusan ponsel membuktikan fungsi pengawasan internal di institusi itu benar-benar lumpuh secara total.

Mafirion meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) tidak hanya berhenti melakukan penindakan di Rutan Kotabumi saja. Pola serupa diduga terjadi di Lapas atau Rutan lain dengan jaringan lebih luas. Harus ada transparansi untuk mengungkap keterlibatan pejabat tertentu di balik operasional sindikat kotor itu.

Pengusutan kasus, sambungnya, jangan sampai berhenti pada satu lokasi saja demi memastikan integritas institusi tetap terjaga. Pemeriksaan menyeluruh di berbagai Lapas sangat diperlukan untuk memastikan



Mafirion

tidak ada jaringan serupa. "Seluruh proses hukum wajib berlangsung transparan tanpa ada fakta yang sengaja ditutup-tutupi Pemerintah," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR Sarifah Ainun Jariyah menambahkan, fenomena ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan warga negara di ruang digital. Pelaku bebas bergerak karena celah teknologi, identitas anonim, serta sistem verifikasi yang belum kuat.

Sarifah mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ciri umum love scam yang sering menggunakan komunikasi intens. Profil pelaku biasanya terlihat sangat sempurna namun mereka enggan melakukan *video*

*call*. "Permintaan uang yang disertai tekanan emosional menjadi tanda kuat bahwa interaksi itu adalah penipuan," jelasnya.

Menanggapi kasus ini, Menteri Imipas Agus Andrianto telah memerintahkan jajarannya mengusut tuntas kasus penipuan bermodus love scamming itu. Pihaknya berkomitmen penuh memberantas segala bentuk kejahatan dari lingkungan pemasarakatan. Penyelidikan mendalam sedang dilakukan untuk menyisir keterlibatan oknum petugas dan juga warga binaan.

Perintah, tegas Agus, turun karena pelaku menggunakan ponsel serta medsos guna menjalankan aksi tipu mereka dari penjara. Padahal, penggunaan ponsel merupakan hal yang dilarang keras bagi warga binaan. Program zero ponsel, pungutan liar, dan narkoba kini diperketat kembali untuk membersihkan institusi itu.

Agus juga memerintahkan Dirjen Pemasarakatan Mashudi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap modus kejahatan yang sangat meresahkan ini. Sanksi berat harus dijatuhkan bagi warga binaan maupun petugas yang terbukti terlibat. "Tindakan tegas tanpa pandang bulu merupakan bentuk komitmen

Pemerintah dalam menegakkan aturan di Lapas," ucapnya.

Sebelumnya, Polda Lampung mengungkap kasus *love scamming* yang diduga dikendalikan para narapidana dari dalam Rutan Kotabumi. Aksi ini melibatkan 137 tahanan dengan total korban mencapai lebih dari 1.200 orang. Sebanyak 671 korban mengalami eksploitasi seksual berbasis daring dengan total kerugian materi mencapai Rp 1,4 miliar.

Kapolda Lampung Heli Assegaf menyatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan intensif terkait kepemilikan ponsel di Rutan Kotabumi. Langkah itu diambil untuk menindaklanjuti laporan pemerasan dengan total kerugian miliaran rupiah. Penyidik terus mengumpulkan bukti tambahan dari para korban guna memperkuat proses hukum bagi pelaku.

Dikatakan, para narapidana itu menjerat korban dengan mengaku sebagai anggota TNI dan Polri demi melancarkan aksinya. Polisi mengamankan 157 ponsel, satu seragam Polri, dua buku tabungan, serta enam kartu ATM. "Penyidik juga mencatat adanya lima oknum pegawai Rutan yang terlibat dalam sindikat ini," terangnya. ■ PYB